

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

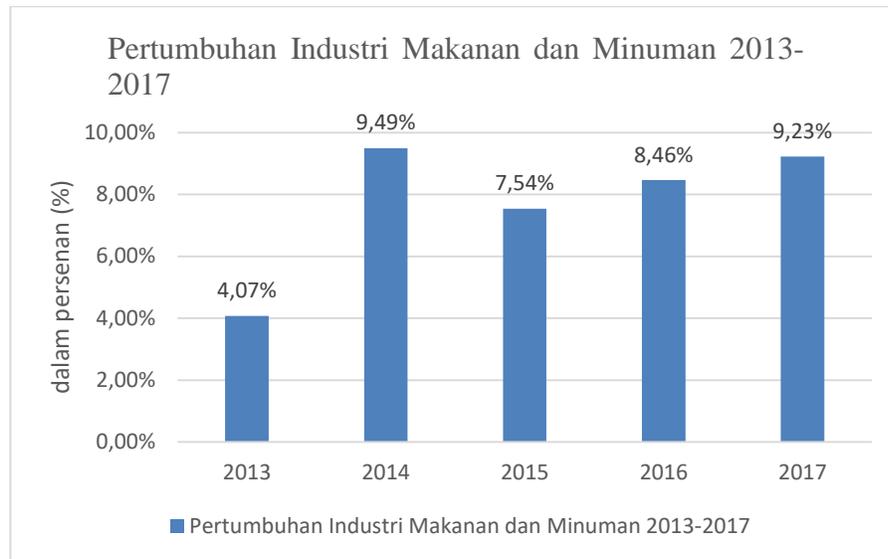
Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, maka Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2017.

Perusahaan industri makanan dan minuman adalah sub kelompok perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki jumlah anggota perusahaan yang lebih banyak dibanding dengan jenis perusahaan lainnya yang terdapat dalam perusahaan manufaktur. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman dengan mengikah bahan mentah menjadi barang dalam proses atau barang jadi.

Banyaknya alasan perusahaan ingin menjadi *go public*, salah satunya untuk memperoleh sumber pendapatan baru. Perusahaan yang sudah *go public* menginginkan perusahaan itu untuk tetap bertahan agar mampu bersaing dengan perusahaan yang akan bermunculan diwaktu yang akan datang, dan juga perusahaan *go public* lebih dipercaya oleh perbankan dalam permasalahan modal dan mempertahankan reputasi perusahaan di mata masyarakat.

Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor yang memiliki pertumbuhan paling tinggi dibandingkan industri manufaktur non migas. Pertumbuhan sektor makanan dan minuman cenderung stabil, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 1,95% dan sektor ini kembali stabil pada tahun-

tahun berikutnya yaitu 2016 sebesar 8,46%, dan 2017 sebesar 9,23% yang dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :



**Gambar 1. 1 Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman 2013-2017**

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)*

Makanan dan minuman telah dijadikan suatu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia, karena mahal atau tidaknya harga produk perusahaan makanan dan minuman akan tetap dibeli oleh masyarakat dalam memenuhi kelangsungan hidup. Pertumbuhan pendapatan industri makanan dan minuman relatif meningkat dari tahun ke tahun, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan makanan dan minuman mempunyai laba yang cukup besar dan tidak menutup kemungkinan untuk meminimalkan beban pajaknya. Berikut perbandingan pertumbuhan industri makanan dan minuman dengan sektor lain :

## Growth of manufacturing industries, 2011-17

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Average	
							2011-16	2017*
<b>GDP Total</b>	<b>6.17</b>	<b>6.03</b>	<b>5.56</b>	<b>5.08</b>	<b>4.88</b>	<b>5.02</b>	<b>5.46</b>	<b>5.03</b>
<b>Manufacturing, Total</b>	<b>6.26</b>	<b>5.62</b>	<b>4.37</b>	<b>4.64</b>	<b>4.33</b>	<b>4.29</b>	<b>4.92</b>	<b>4.18</b>
<b>Non-oil &amp; gas manufacturing</b>	<b>7.46</b>	<b>6.98</b>	<b>5.45</b>	<b>5.61</b>	<b>5.05</b>	<b>4.42</b>	<b>5.83</b>	<b>4.71</b>
Coal and Refined Petroleum Products	-0.33	-2.40	-2.64	-2.12	-1.13	3.24	-0.90	-0.10
Food Products and Beverages	10.98	10.33	4.07	9.49	7.54	8.46	8.48 ✓	8.24
Tobacco Products	-0.23	8.82	-0.27	8.33	6.24	1.64	4.09	1.77
Textiles and Wearing Apparel	6.49	6.04	6.58	1.56	-4.79	-0.13	2.63	2.72
Leather & Related Products & Footware	10.94	-5.43	5.23	5.62	-3.97	8.15	3.42	3.19
Wood & of its products (except furniture)	-2.72	-0.80	6.19	6.12	-1.63	1.80	1.49	-1.14
Paper & Paper Products; Repro of Recorded	3.89	-2.89	-0.53	3.58	-0.16	2.16	1.01	0.37
Chem & Pharma & Botanical Products	8.66	12.78	5.10	4.04	7.61	5.48	7.28 ✓	6.83
Rubber & Plastics Products	2.08	7.56	-1.86	1.16	5.04	-8.34	0.94	2.95
Non-Metallic Mineral	7.78	7.91	3.34	2.41	6.03	5.46	5.49	-1.93
Manufacture of Basic Metals	13.56	-1.57	11.63	6.01	6.21	0.76	6.10	4.25
Computer, Optical Products & Elec.Equip	8.79	11.64	9.22	2.94	7.83	4.34	7.46 ✓	3.81
Machinery and Equipment	8.53	-1.39	-5.00	8.67	7.58	5.05	3.91	4.31
Transport Equipment	6.37	4.26	14.95	4.01	2.40	4.52	6.09 ✓	3.10
Furniture	9.93	-2.15	3.64	3.60	5.17	0.47	3.44	3.71
Other Manuf, Repair & Instr of Machinery	-1.09	-0.38	-0.70	7.65	4.66	-2.91	1.21	-1.03

**Gambar 1. 2 Perbandingan Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman**

*Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)*

### 1.2 Latar Belakang Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Keagenan atau *Agency Theory*. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan sesuatu. Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung melaksanakan yang diperintahkan prinsipal. Dalam penelitian ini, pemegang saham adalah prinsipal sedangkan manajemen perusahaan adalah agen. *Tax avoidance* dilakukan karena adanya tekanan dari pemegang saham terhadap manajemen perusahaan, pemegang saham menginginkan laba yang besar di perusahaan dan manajemen perusahaan melakukan *tax avoidance* guna mendapatkan laba yang maksimal dan mendapatkan bonus dari pemegang saham dengan cara menekan beban pajak suatu perusahaan. Dengan adanya asimetri informasi mengenai keuangan perusahaan menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersihnya untuk memaksimalkan bonus

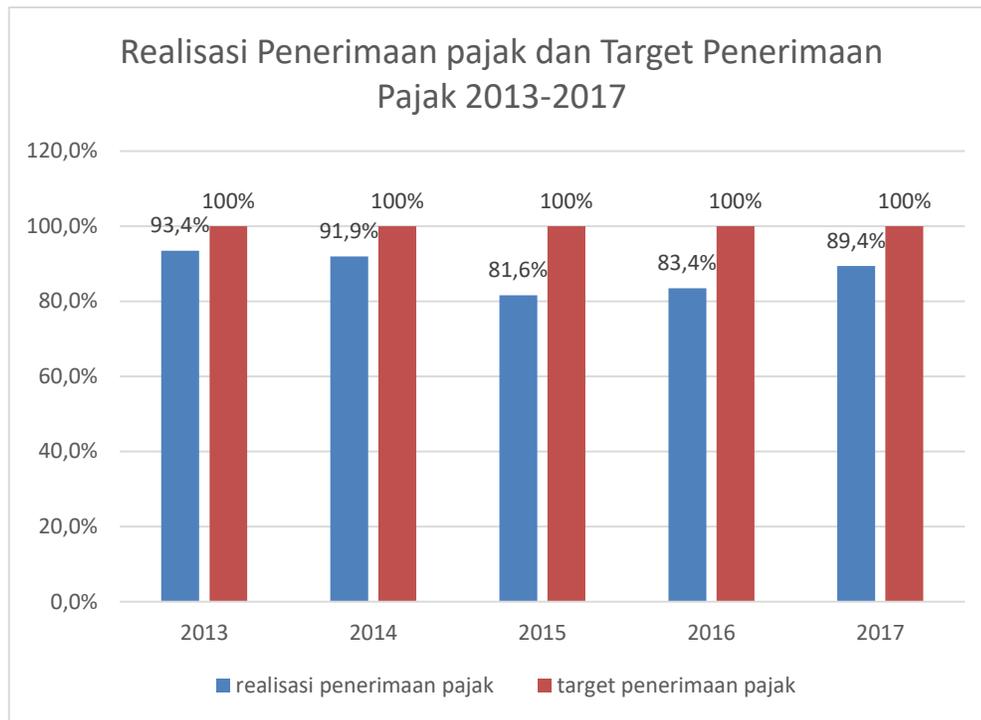
mereka dengan cara mengelola beban pajaknya semaksimal mungkin, karena pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan.

Perkembangan pemerintahan di Indonesia memerlukan daya yang besar dalam melakukan pembangunan didalam negara untuk meningkatkan perekonomian nasional. Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah melalui pajak, sehingga pemerintah membuat suatu regulasi yang mengatur perpajakan di negara Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang diterima oleh suatu negara. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak, dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Di akuntansi juga menjelaskan bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini berbanding terbalik dengan tujuan perusahaan yang ingin mendapatkan laba yang besar. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan pajak sebagai beban dan kewajiban, yang dapat mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan *tax planning*, keduanya saling berkaitan karena sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau menghilangkan pajak.

*Tax avoidance* merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan karena masih berada dalam peraturan perpajakan. Strategi penghindaran pajak ini merupakan cara yang diperkenankan undang-undang namun strategi yang diterapkan perusahaan ini merugikan penerimaan negara (Shophar dalam Yenni:1999). Terkait dengan *tax avoidance* di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan *tax avoidance* dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005).

Pajak merupakan salah sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN setiap tahunnya penerimaan dari sektor pajak memiliki bagian yang paling besar dalam penerimaan. Setiap tahun target penerimaan dari sektor perpajakan mengalami peningkatan. Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak tahun 2013-2017:



**Gambar 1. 3 Target APBN dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2013-2017**

*Sumber: www.cnbcindonesia.com (2018)*

Gambar 1.3 menyatakan bahwa pada tahun 2014 penerimaan pajak mencapai Rp985 triliun atau 91,9% dari APBN namun pada tahun 2015 penerimaan pajak mencapai Rp1.055 triliun atau 81,6% dari APBN. Jumlah penerimaan pajak meningkat namun target penerimaan pajak turun sebesar 10,3%, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada perusahaan yang menghindari pajaknya demi mendapatkan laba yang tinggi.

Pajak yang diasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba. Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia bagi perusahaan untuk dibagi sebagai dividen maupun diinvestasikan kembali. Usaha memaksimalkan laba dilakukan perusahaan dengan melakukan efisiensi segala macam biaya termasuk biaya pajak. Upaya pemerintah untuk melakukan pengoptimalan dalam sektor pajak ini bukan tanpa

kendala, salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan juga penggelapan pajak (*tax evasion*) atau dengan berbagai macam kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan.

Di Indonesia, penghindaran pajak bukan hal yang baru lagi. Fenomena yang terdapat pada perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yaitu PT Coca Cola Indonesia. PT Coca Cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPH) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan mengarah pada penghasilan kena pajak yang kecil. Edward Sianipar, perwakilan DJP di persidangan itu, perwakilan PT CCI tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan. Selanjutnya, hakim masih akan memeriksa kasus ini sebelum menjatuhkan putusan. ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id)).

**Tabel 1. 1 Total Aset dan *Cash Effective Tax Rate***

No	Perusahaan	Tahun	Total Aset	<i>Cash Effective Tax Rate</i>
1.	PT Siantar Top	2014	Rp1.700.204.039.895.000	0,3179
		2015	Rp1.919.568.037.170.000	0,2208
		2016	Rp2.336.411.494.941.000	0,2082
		2017	Rp2.342.432.443.196.000	0,2103

*Sumber: Olah data penulis, 2019*

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan PT. Siantar Top memiliki total aset yang setiap tahunnya meningkat dan menyebabkan rasio *cash effective tax rate* menurun. Dimana *cash effective tax rate* yang dibawah 0,25 mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Dengan kasus tersebut peneliti menganalisis bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Coca Cola Indonesia karena ingin menekan biaya pajak yang akan disetorkan. Cara yang dilakukan PT Coca Cola Indonesia dalam melakukan penghindaran pajak yaitu dengan cara memanipulasi setoran pajak dan menaikkan beban biaya iklan yang tinggi agar penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia menjadi kecil. Pada perusahaan PT.Siantar Top juga terindikasi melakukan *tax avoidance*, beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* seperti kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan.

Menurut Permanasari (2016) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Berdasarkan sudut pandang hubungan keagenan, akan terjadi kecenderungan bahwa manajemen akan mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. Menurut penelitian yang dilakukan (Prasetyo &

Pramuka, 2018) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Keberadaan struktur kepemilikan institusional tersebut mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak agresif untuk memaksimalkan perolehan laba untuk investor institusional. Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Pada pengungkapan sukarela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis. Hasil penelitian Utami (2013) dan Fadhilah (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Diantari & Ulupui, 2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Fiandri dan Muid (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Menurut Subagiastra (2016) pengertian komite audit adalah alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, yang dapat mengurangi *agency cost* serta meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Pengungkapan perusahaan yang dilakukan oleh komite audit menunjukkan bahwa perusahaan telah bekerja berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Hasil penelitian Prakoso (2014) komite audit tidak signifikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sama seperti dengan penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitiannya Diantari dan IGK (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas *good*

*corporate governance* (GCG) di dalam perusahaan, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Oktofian (2015) yang menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* dengan menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit yang ada dalam suatu perusahaan dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Menurut Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Menurut (Dewinta & Setiawan, 2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang artinya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh (Swingly & Sukartha, 2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Arif dan Fahlefi (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan masih terdapat inkonsistensi, maka masih relevan untuk dilakukan penelitian tersebut. Penulis mengambil judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)”**.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dalam sektor perpajakan, pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar karena pajak adalah sumber utama penerimaan negara untuk mendanai anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara. Namun, hal ini berbeda dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin karena bagi perusahaan beban pajak merupakan suatu ancaman dari tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Maka dari itu banyak perusahaan yang agresif dengan pajaknya atau meminimalkan beban pajak perusahaan. Namun upaya meminimalkan beban pajak diperbolehkan akan tetapi disisi lain upaya ini tidak diinginkan oleh negara karena merugikan.

Peneliti ingin meneliti faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan terutama di perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, maka penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan dan *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017?
2. Apakah kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?

4. Apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance* berpengaruh secara simultan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.
4. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.
5. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Aspek Teroitis**

Dapat digunakan oleh akademisi maupun para peneliti berikutnya sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan, menjadi bahan referensi khususnya untuk penulisan karya ilmiah dengan topik yang sama dan hasil penelitian diharapkan menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian yang lebih mendalam dengan menambah periode penelitian, variabel penelitian, dan objek penelitian lain.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

Kegunaan praktis yang ingin diperoleh dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Khususnya bagi perusahaan sektor makanan dan minuman dapat dijadikan sebagai sumber evaluasi *tax avoidance*.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat melakukan evaluasi perbaikan peraturan perpajakan terutama tentang *tax avoidance*.

3. Bagi Investor

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemegang saham dalam mengambil keputusan investasi.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penyusunan tugas akhir agar terarah dan berjalan dengan baik, maka sekiranya perlu dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup penelitian ini, yaitu:

- 1) Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini mengarah untuk meneliti pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
- 2) Objek dari penelitian ini adalah perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan secara umum.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini mengungkapkan secara ringkas, jelas tentang kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan dan *tax avoidance*. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah-masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) serta teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini menyajikan beberapa kesimpulan hasil analisis penelitian dan saran dari hasil penelitian ini.